

## **PERAN KOMITE SEKOLAH DAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN SLEMAN**

**Oleh:**  
**Joko Tri Nugraha**

### **Abstrak**

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Pendidikan sebagai salah satu layanan publik dasar mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. PP No. 17 tahun 2010 menegaskan bahwa keberadaan komite sekolah dan dewan pendidikan memiliki peran dan fungsi sangat penting. Penelitian ini mengkaji peran komite sekolah dan dewan pendidikan di Kabupaten Sleman dari aspek *advisory*, *supporting* dan *controlling* dalam upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan peran komite sekolah dan dewan pendidikan di Kabupaten Sleman belum seperti yang diharapkan. Meski secara kuantitatif sudah menunjukkan kinerja yang baik, namun hasil FGD ditemukan beberapa peran yang belum dijalankan secara optimal, terutama peran *supporting* dan *controlling* karena ada beberapa hambatan diantaranya masih adanya inkonsistensi kebijakan, kurangnya dukungan sumber daya manusia maupun dana dan sarana, adanya mispersepsi dan misinformasi dalam memaknai peran dan fungsi komite sekolah dan dewan pendidikan serta rendahnya partisipasi masyarakat maupun kalangan usaha.

***Kata kunci:*** *dewan pendidikan, komite sekolah, layanan pendidikan*

### **A. PENDAHULUAN**

Desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah merupakan bentuk desentralisasi yang langsung sampai ke ujung tombak pendidikan di lapangan. Jika kantor cabang dinas pendidikan kecamatan dan dinas pendidikan kabupaten/kota lebih memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pembinaan, pengarahan, pemantauan dan penilaian maka sekolah seharusnya diberikan peran nyata dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Hal ini disebabkan proses interaksi edukatif di sekolah merupakan inti dari proses pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, bentuk desentralisasi pendidikan yang paling mendasar adalah yang dilaksanakan oleh sekolah, dengan menggunakan komite sekolah sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat dan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai proses pelaksanaan layanan pendidikan secara nyata dalam masyarakat.

Sektor pendidikan, sebagai layanan publik dasar telah mendapat perhatian dari pemerintah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Kebijakan nasional tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, di mana telah diatur bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran dari belanja daerah sekurang-kurangnya 20 persen untuk pendidikan, yang pengelolaan dan penyelenggaraannya telah diatur dalam PP No. 17 tahun 2010 beserta perubahannya melalui PP No. 66 Tahun 2010.

Untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002 disebutkan bahwa peran yang harus diemban oleh komite sekolah dan dewan pendidikan adalah sebagai: (1) *Advisory Agency* (pemberi pertimbangan); (2) *Supporting Agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan); (3) *Controlling Agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan) dan; (4) Mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah).

Menurut Topatimasang (2004) mengemukakan pemikiran Freire mengenai pendidikan itu memiliki tujuan akhir dari proses pendidikan, yaitu upaya untuk memanusiakan manusia (humanisasi). Hal ini berarti pemerdekaan atau pembebasan manusia dari suatu batas yang menindas dari luar kehendaknya.

Menurut Rosidi (2004) baik formal maupun non formal, pendidikan adalah sarana pewarisan kebudayaan. Setiap masyarakat mewariskan kebudayaannya kepada generasi yang lebih muda, agar tradisi kebudayaannya tetap hidup dan berkembang melalui pendidikan. Selanjutnya menurut Ardian (2004) dalam bingkai pendidikan, uluran tangan pemerintah bagi masyarakat yang tidak kompeten akan mengorbankan evolusi kognitif bangsa. Evolusi kognitif menuju sebuah dataran tinggi dari demokrasi yaitu kognikrasi. Sebuah hidup bersama yang diatur berdasarkan intelegensia bukan semata-mata *common sense* dan rasio instrumental. Proses evolusi yang terjadi termanifestasi melalui pendidikan, sebagai salah satu fungsi penting yang harus dijalankan oleh pemerintah, di dalamnya menyangkut hak

setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Meski demikian, yang terjadi adalah kebijakan di bidang pendidikan dalam kerangka kebijakan publik selalu sarat kontroversi. Sinyal ini mempunyai dua arti. *Pertama*, publik yang semakin kritis terhadap berbagai kebijakan pendidikan yang menyangkut nasib satu generasi bangsa ini atau *kedua*, sebuah pemerintahan yang semakin kentara persoalan-persoalannya di bidang pendidikan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Buchori (2004), pendidikan Indonesia tengah mengalami proses involusi dan bergerak tanpa arah yang jelas. Dari hari ke hari manusia yang terlibat dalam pendidikan bukannya tumbuh kian cerdas justru mutunya semakin menurun meskipun *input* fasilitas fisiknya terus bertambah. Ketidakjelasan arah pendidikan itu menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak kompetitif lagi dibandingkan dengan pencapaian negara lain, bahkan di wilayah Asia Tenggara sekalipun. Kebijakan pendidikan di negara kita tidak pernah jelas, pendidikan hanya melanjutkan pendidikan yang elite eksklusif dengan kurikulum elitis yang hanya dapat ditangkap oleh 30 persen anak didik.

Berbagai penelitian juga menemukan indikasi kinerja komite sekolah dan dewan pendidikan belum menunjukkan kinerja yang optimal. Keberadaannya hanya menjadi stempel setiap kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah, terutama untuk menarik dana dari orang tua siswa. Padahal, komite sekolah dibentuk tidak untuk menjadi juru tagih, melainkan mengganti peran yang dulunya dikuasai oleh pemerintah sehingga pengelolaan sekolah bisa lebih partisipatif, terbuka, akuntabel serta mencerminkan kebutuhan *stakeholder*. Hasil penelitian (Rofikoh, 2011) tentang indeks kepuasan layanan pendidikan di Kabupaten Bantul menemukan, meski pemerintah daerah telah mendorong sekolah untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tetapi dalam implementasinya masih dihadapkan pada berbagai kendala sehingga masih ditemui adanya keluhan dari masyarakat dalam transparansi maupun akuntabilitas baik dalam penyusunan RAPBS, pengelolaan dana BOS, seleksi penerimaan siswa baru (PSB), sementara dewan pendidikan dan komite sekolah dalam implementasinya juga belum optimal.

Mengingat pentingnya peran dan fungsi komite sekolah serta dewan pendidikan bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan, maka komite sekolah dan dewan pendidikan dituntut mampu menempatkan posisinya, yakni sebagai mitra satuan pendidikan dengan menjalankan peran dan fungsi yang sesungguhnya sebagai lembaga *advisory*, *supporting*, maupun *controlling*. Penelitian ini berusaha mengevaluasi kinerja komite sekolah dan dewan pendidikan sesuai dengan fungsi yang diamanatkan dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002 sebagaimana yang sudah diperbaharui melalui PP No. 17 Tahun 2010.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui *survey* dengan kuesioner sebagai alat pengumpul data juga FGD dengan *multistakeholders*. Peneliti menggunakan *Multi Stage Cluster Sampling*. Teknik sampling ini digunakan melalui dua tahap. *Pertama*, menentukan sampel daerah dan; *Kedua*, menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga (Babbie, 1979: 185 dan Black, 1999: 254). Pada *tahap pertama* adalah menentukan sampel daerah. Penelitian ini sasarannya adalah pendidikan dasar dan menengah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*. Teknik penentuan sampel sekolah dengan metode *cluster* berdasarkan wilayah kerja dari berbagai kelompok tingkatan sekolah, yakni dari sekolah yang berada di kecamatan Ngemplak, Berbah, Godean, Sleman, Gamping, Seyegan, Minggir, Pakem, Depok dan Mlati. Dengan jumlah populasi sekolah sebanyak 705 buah terdiri dari SD sebanyak 500, SMP sebanyak 106, SMA sebanyak 46 dan SMK sebanyak 53.

Penentuan besarnya anggota sampel menggunakan pendapat Arikunto dengan mengambil sampel sebanyak 15 %. *Tahap kedua*, yang digunakan sebagai sasaran dalam penelitian ini adalah para pengurus komite sekolah, yang dilakukan dengan teknik *simple random sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 106 sekolah dengan metode *proportionate sampling*, dengan perincian sekolah SD

sebanyak 75 sekolah. SMP sebanyak 16 sekolah. SMA sebanyak 7 sekolah sedangkan SMK sebanyak 2 sekolah.

### C. HASIL PENELITIAN

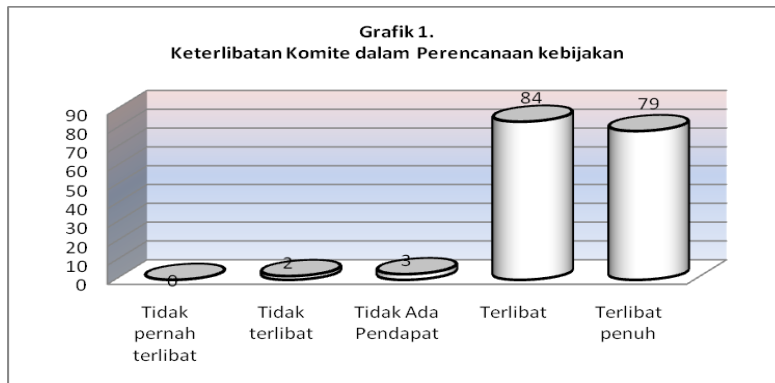
#### Peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan di Kabupaten Sleman

##### 1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*)

Komite sekolah memiliki peran sebagai *advisory agency*, yakni badan yang memberikan pertimbangan kepada sekolah atau yayasan. Penelitian ini menggunakan 5 indikator untuk mendeskripsikan peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan. Indikator tersebut antara lain: Peran komite sekolah dalam perencanaan kebijakan dan program pendidikan, peran komite sekolah dalam penyusunan RAPBS dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan, peran komite sekolah dalam memberikan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program sekolah, peran komite sekolah dalam menyusun berbagai kriteria, standar, norma dan panduan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan peran komite sekolah dalam penyusunan peraturan pendidikan di sekolah.

Persoalan penting dari eksistensi sebuah organisasi adalah kepemilikan AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga). Berkaitan dengan hal ini komite sekolah yang memiliki AD/ART dari 168 responden menunjukkan bahwa sebagian besar komite sekolah sudah memiliki AD/RT (78 %), tetapi masih ada beberapa komite sekolah yang belum memiliki AD/ART (22 %). Meski komite sekolah di Kabupaten Sleman sebagian besar memiliki AD/ART, hasil FGD bersama *multistakeholders* di Kabupaten Sleman menemukan fakta di lapangan sebagai berikut. Peran yang paling menonjol adalah *advisory agency* (kajian/penelitian, kunjungan kerja, diskusi dengan komite). Peran pendukung atau *supporting* menemui kesulitan terutama dalam hal pendanaan. Sementara peran pengawas atau *controlling* belum maksimal dilakukan karena dalam persepsi responden wewenangnya tidak sampai kesana. Berkaitan dengan masalah pendanaan komite hanya bisa menghimbau karena memungut tidak diperbolehkan. Dengan demikian, peran dan fungsi komite sekolah kuat dalam aturan tapi mandul dalam pelaksanaan. Gambaran

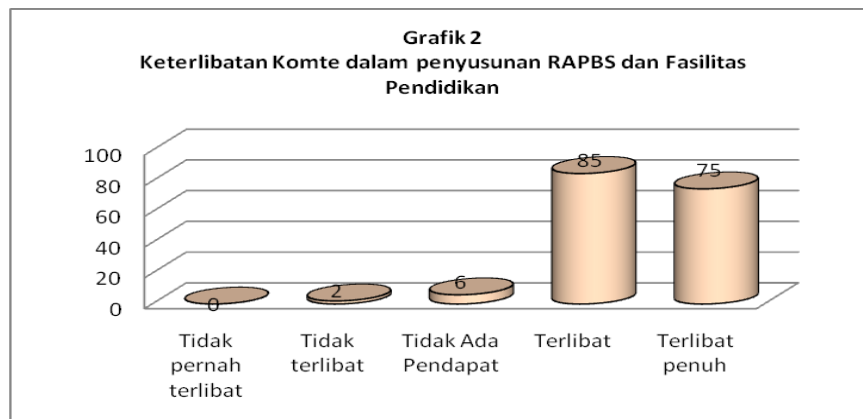
mengenai keterlibatan peran komite sekolah dalam perencanaan kebijakan dan program pendidikan menunjukkan hasil sebagai berikut:



Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tampak pada grafik 1 di atas, diketahui persepsi responden tentang komite sekolah tentang keterlibatannya dalam perencanaan kebijakan dan program pendidikan, dapat dijelaskan bahwa dari 168 responden penelitian menggambarkan bahwa separuh responden menyatakan komite sekolah sudah terlibat dalam perencanaan kebijakan dan program pendidikan. Meski dari hasil pengolahan statistik menggambarkan bahwa komite sekolah telah terlibat dalam perencanaan kebijakan dan program pendidikan, peran ini masih terbatas karena fakta di lapangan sumber daya manusia komite sekolah sangat terbatas terutama di daerah terpencil. Sehingga mencari orang-orang yang peduli dengan pendidikan masih sangat sulit.

Selanjutnya peran komite sekolah dalam penyusunan RAPBS dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan menunjukkan hasil sebagai berikut:

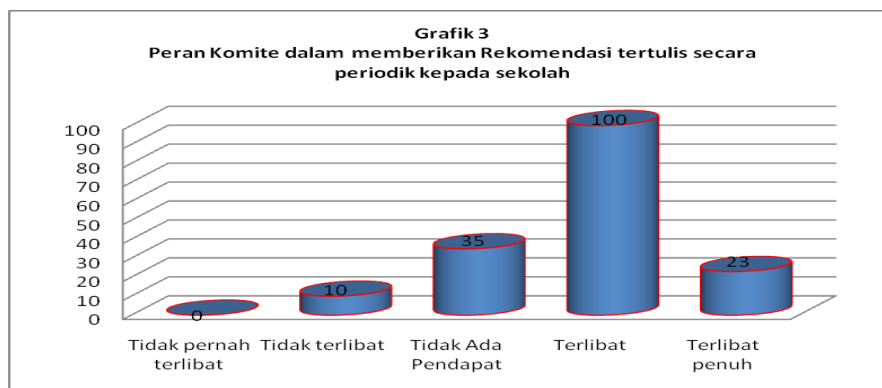


Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tampak pada grafik 2 di atas, dapat diketahui persepsi responden tentang komite sekolah terlibat dalam penyusunan RAPBS dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan. Data tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 168 responden penelitian menggambarkan bahwa lebih dari separuh responden menyatakan komite sekolah terlibat dalam penyusunan RAPBS dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan.

Setiap organisasi, bagaimanapun kecilnya organisasi juga memerlukan anggaran dan fasilitas. Demikian juga komite sekolah. Namun demikian di Kabupaten Sleman kecenderungan yang muncul adalah komite sekolah tidak memiliki dana, sehingga tidak bisa berperan lebih maksimal. Pada tahap awal pembentukannya komite sekolah disambut sangat positif oleh sebagian besar masyarakat, dengan harapan yang tinggi pula. Meski seiring dengan waktu, harapan yang tinggi itu banyak yang pupus di tengah jalan. Penyebabnya antara lain komite sekolah tidak memiliki dana.

Selanjutnya peran komite dalam hal memberikan rekomendasi secara periodik secara tertulis kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, menunjukkan hasil sebagai berikut:

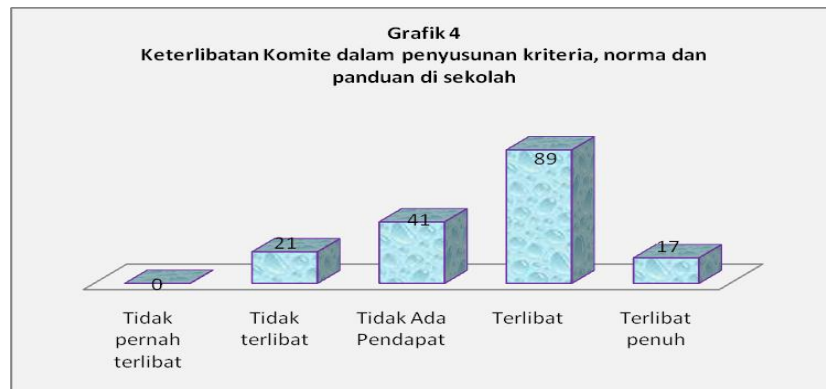


Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tampak pada grafik 3 di atas, dapat diketahui persepsi responden tentang komite sekolah memberikan rekomendasi

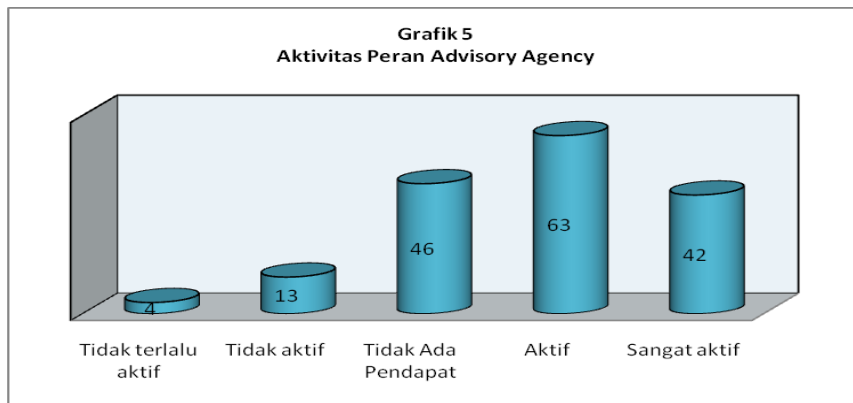
secara periodik secara tertulis kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, dapat dijelaskan bahwa dari 168 responden penelitian, menggambarkan bahwa lebih dari separuh responden menyatakan komite sekolah memberikan rekomendasi secara periodik terutama tertulis kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan.

Analisis distribusi frekuensi di atas juga diperkuat hasil FGD bahwa komite sekolah di Kabupaten Sleman mampu menjadi wahana pemersatu antara keluarga, sekolah dan masyarakat meski dengan beberapa keterbatasan seperti dana dan sumber daya manusia dari komite sendiri. Peran komite sekolah dalam menyusun berbagai kriteria, standar, norma dan panduan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah menunjukkan hasil sebagai berikut:



Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tampak pada grafik 4 di atas, dapat diketahui persepsi responden tentang komite sekolah dalam menyusun berbagai kriteria, standar, norma dan panduan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Distribusi frekuensi komite sekolah menyusun berbagai kriteria, standar, norma dan panduan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah menjelaskan bahwa dari 168 responden penelitian, menggambarkan bahwa lebih dari separuh responden menyatakan komite sekolah telah menyusun berbagai kriteria, standar, norma dan panduan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Diskripsi peran *advisory agency* secara kumulatif berdasarkan pada indikator di atas dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan grafik 5 di atas, diketahui persepsi responden tentang peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dari 168 responden penelitian, 62 % menyatakan keterlibatannya dalam peran *advisory*. Di Kabupaten Sleman peran *advisory* atau pemberi pertimbangan merupakan peran yang sangat menonjol, sebagai yakni badan yang memberikan pertimbangan kepada sekolah atau yayasan. Idealnya, sekolah dan yayasan pendidikan harus meminta pertimbangan harus kepada komite sekolah dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan sekolah, termasuk juga dalam merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah yang bersifat *given*, seperti di sekolah swasta dengan ciri khas tertentu. Hasil analisis di atas juga diperkuat hasil FGD dari dewan pendidikan bahwa peran yang paling menonjol dari komite sekolah adalah sebagai *advisory agency* atau pemberi pertimbangan. Sementara dua peran lainnya tidak bisa berjalan secara maksimal karena berbagai keterbatasan.

## **2. Pemberi dukungan (*supporting agency*)**

Komite sekolah memiliki peran sebagai *supporting agency*, yakni badan yang memberikan dukungan berupa dana, tenaga dan pikiran. Jika dahulu peran BP3 lebih sebagai pendukung dana, maka penekanan peran komite sekolah tidak semata-mata pada aspek dana saja melainkan juga pada aspek yang lainnya, terutama berupa gagasan dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Dalam penelitian ini untuk melihat gambaran peran komite dalam memberikan dukungan (*supporting agency*) digunakan tiga indikator pertanyaan, antara lain: (1) Komite sekolah telah menjalin kerja sama dengan masyarakat dan

pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2) Komite sekolah telah menyusun program inovatif yang secara langsung memberi dampak mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan; (3) Komite sekolah telah menggalang dana dari masyarakat baik perorangan, organisasi, dunia usaha untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

Peran komite sekolah yang telah menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu menunjukkan hasil sebagai berikut:

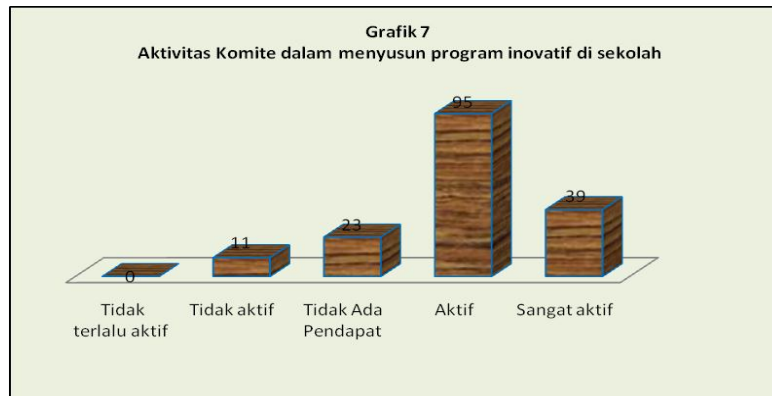


Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tampak pada grafik 6 di atas, dapat diketahui persepsi responden tentang komite sekolah menjalin kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Distribusi frekuensi komite sekolah telah menjalin kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu menjelaskan bahwa dari 168 responden penelitian, menggambarkan bahwa lebih dari separuh responden menyatakan komite sekolah telah menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Bentuk kerja sama antara komite dengan masyarakat dan pemerintah antara lain ikut serta mengawasi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, mengadakan pertemuan dengan dewan guru, wali murid dan UPTD untuk membahas tentang peningkatan mutu pendidikan di lingkungan sekolah dan memutuskan biaya yang dapat digali dari wali murid dan masyarakat yang terdapat di lingkungan sekolah.

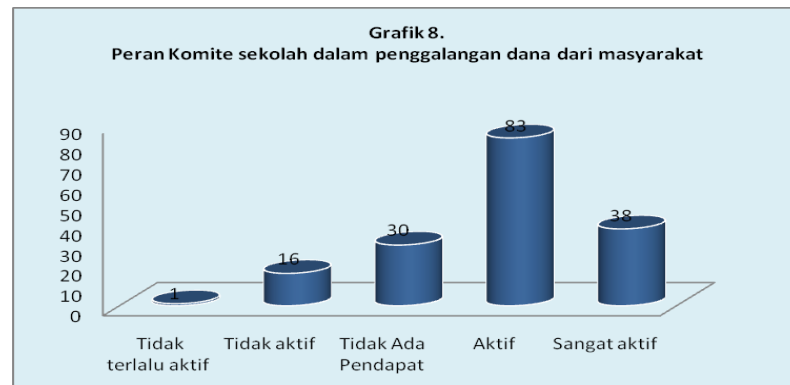
Sementara peran komite yang telah menyusun program inovatif yang secara langsung memberi dampak mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan menunjukkan hasil:



Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tampak pada grafik 7 di atas, dapat diketahui persepsi responden tentang komite sekolah telah menyusun program inovatif yang secara langsung memberi dampak mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Data di atas menjelaskan bahwa dari 168 responden penelitian, menggambarkan bahwa lebih dari separuh responden menyatakan komite sekolah telah menyusun program inovatif yang secara langsung memberi dampak mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Upaya komite sekolah dalam mendorong orang tua dan masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan antara lain: mengadakan pertemuan rutin dengan wali murid dan mengajak semua wali murid untuk mendukung program pendidikan yang bermutu demi kemajuan anak didik.

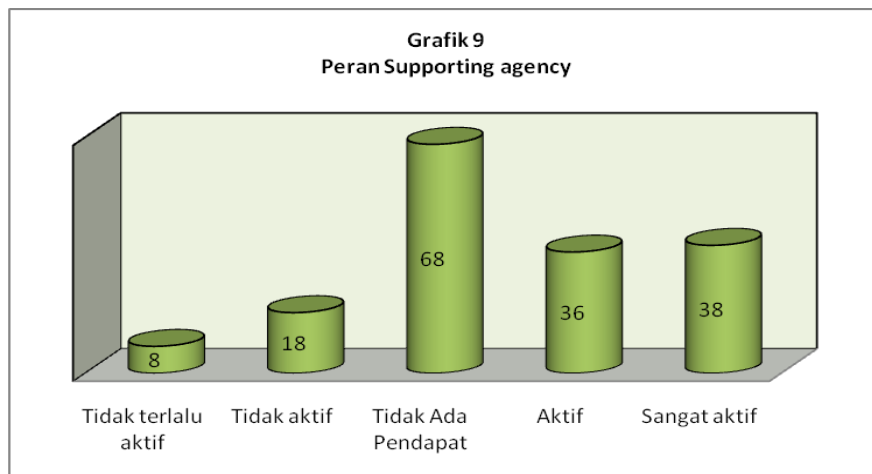
Selanjutnya, peran komite sekolah dalam menggalang dana dari masyarakat baik perorangan, organisasi, dunia usaha untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan menunjukkan hasil:



Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tampak pada grafik 8 di atas, dapat diketahui persepsi responden tentang komite sekolah telah menggalang dana dari masyarakat baik perorangan, organisasi, dunia usaha untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 168 responden penelitian, menggambarkan bahwa banyak responden menyatakan komite sekolah telah menggalang dana dari masyarakat baik perorangan, organisasi, dunia usaha untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

Diskripsi peran *supporting agency* secara kumulatif berdasarkan pada indikator di atas dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisis statistik dapat diketahui persepsi responden tentang peran komite sekolah sebagai pemberi dukungan. Dari 168 responden penelitian 44 % menyatakan keterlibatannya dan berperan sebagai pemberi

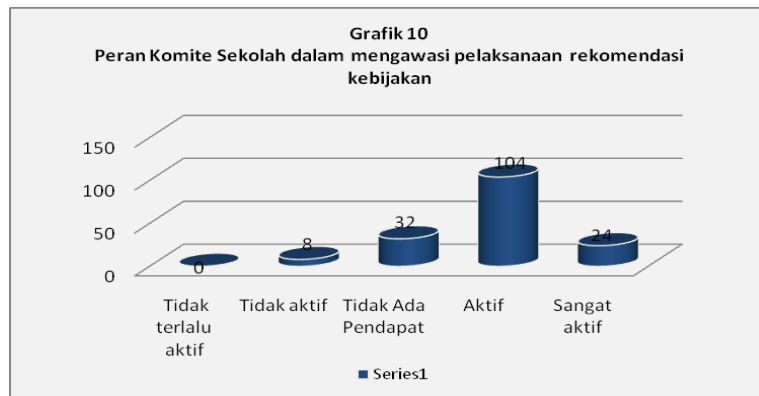
dukungan. Di Kabupaten Sleman peran supporting dari komite sekolah masih lemah. Meski banyak responden menyatakan telah menggalang dana dari masyarakat, tetapi dari hasil FGD di lapangan terungkap bahwa Komite menemui banyak kesulitan karena tidak adanya peraturan atau landasan hukum bagi komite untuk menggalang dana dari masyarakat. Kasus yang menarik dijumpai di SDN Dengung di mana program BOS dari pemerintah menjadikan sekolah gratis berimbas pada ketidakmauan orang tua untuk memberikan sumbangan ke sekolah. Bahkan pernah terjadi seorang kepala sekolah dipindahkan karena menggalang dana dari orang tua.

### **3. Melakukan pengawasan (*controlling agency*)**

Komite sekolah memiliki peran sebagai *controlling agency*, yakni badan yang melaksanakan pengawasan sosial kepada sekolah. Pengawasan sosial yang dilakukan lebih memiliki implikasi sosial dan dilaksanakan secara preventif, seperti ketika sekolah menyusun RAPBS atau ketika sekolah menyusun laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini untuk menggambarkan peran komite dalam melakukan pengawasan (*controlling agency*) digunakan lima indikator pertanyaan, antara lain: (1) Komite sekolah telah mengawasi pelaksanaan rekomendasi mengenai kebijakan dan program pendidikan sekaligus meminta klarifikasi kepada sekolah tentang rekomendasi yang belum dilaksanakan untuk dievaluasi; (2) Komite sekolah melakukan evaluasi terhadap program inovatif tersebut secara berkelanjutan; (3) Komite sekolah melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil kegiatan yang telah dilakukan; (4) Komite sekolah menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil kegiatan pengawasan; (5) Komite sekolah menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatan dan hasil pengawasan terhadap pihak-pihak yang terkait.

Peran komite dalam mengawasi pelaksanaan rekomendasi mengenai kebijakan dan program pendidikan sekaligus meminta klarifikasi kepada sekolah tentang rekomendasi yang belum dilaksanakan untuk dievaluasi menunjukkan hasil:



Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tampak pada grafik 10 di atas, dapat diketahui persepsi responden tentang komite sekolah mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut sekaligus meminta klarifikasi kepada sekolah tentang rekomendasi yang belum dilaksanakan untuk dievaluasi. Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 168 responden penelitian, menggambarkan bahwa lebih dari separuh responden menyatakan komite sekolah mengawasi pelaksanaan rekomendasi sekaligus meminta klarifikasi kepada sekolah tentang rekomendasi yang belum dilaksanakan untuk dievaluasi. Peran komite sekolah dalam melakukan evaluasi program inovatif secara berkelanjutan menunjukkan hasil:



Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tampak pada grafik 11 di atas, dapat diketahui persepsi responden tentang komite sekolah melakukan evaluasi terhadap program inovatif tersebut secara berkelanjutan. Dari data di atas tampak bahwa dari 168 responden penelitian, menggambarkan bahwa lebih dari separuh responden

menyatakan komite sekolah melakukan evaluasi terhadap program inovatif tersebut secara berkelanjutan.

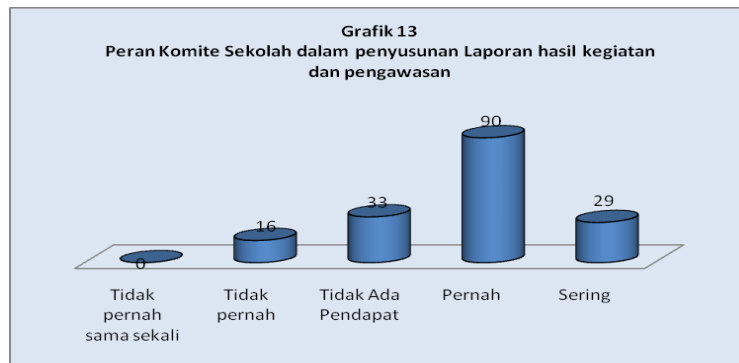
Pada peran komite sekolah dalam melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan hasil:



Sumber: Data Primer Diolah

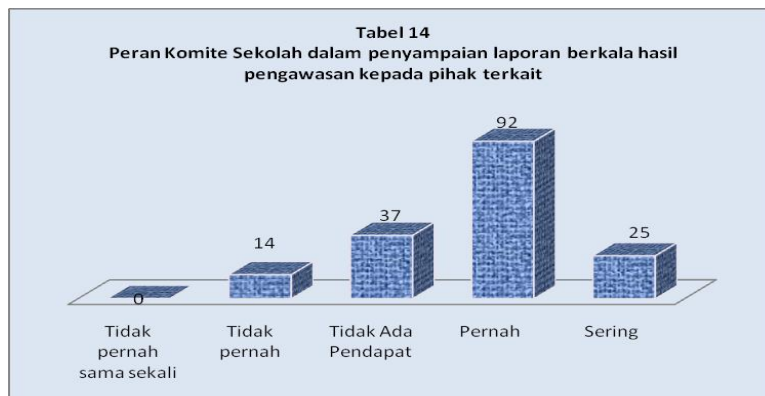
Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tampak pada grafik 12 di atas, dapat diketahui persepsi responden tentang komite sekolah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil kegiatan yang telah dilakukan. Data tersebut menjelaskan bahwa dari 168 responden penelitian, menggambarkan bahwa lebih dari separuh responden menyatakan komite sekolah telah melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil kegiatan yang telah dilakukan.

Upaya komite sekolah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan antara lain meminta pada sekolah untuk mengadakan pertemuan setiap tiga bulan sekali untuk mengevaluasi semua program yang telah disepakati. Sementara peran komite sekolah dalam menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil kegiatan pengawasan menunjukkan hasil sebagai berikut:



Sumber: Data Primer Diolah

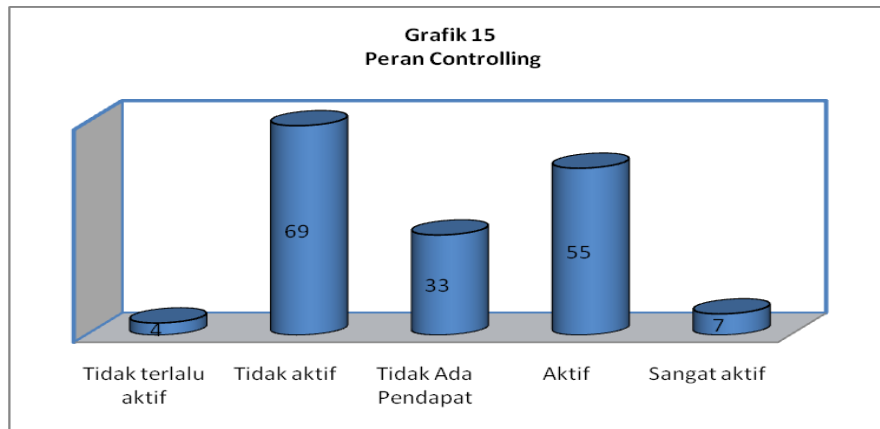
Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tampak pada grafik 12 di atas, dapat diketahui persepsi responden tentang komite sekolah menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil kegiatan pengawasan. Data tersebut menjelaskan bahwa dari 168 responden penelitian, menggambarkan bahwa lebih dari separuh responden menyatakan komite sekolah menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil kegiatan pengawasan. Selanjutnya, peran komite sekolah dalam menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatan dan hasil pengawasan terhadap pihak-pihak terkait menunjukkan hasil sebagai berikut:



Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tampak pada grafik 14 di atas, dapat diketahui persepsi responden tentang komite sekolah menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatan dan hasil pengawasan. Data tersebut menjelaskan bahwa dari 168 responden penelitian, menggambarkan bahwa lebih dari separuh responden menyatakan komite sekolah menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatan dan hasil pengawasan kepada pihak-pihak terkait.

Diskripsi peran *Controlling agency* secara kumulatif berdasarkan pada indikator di atas dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui mengenai peran komite sekolah sebagai pengawas. Dari 168 responden penelitian, 52,3 % menyatakan keterlibatannya dalam peran sebagai pengawas. Peran komite sekolah di Kabupaten Sleman sebagai *controlling agency* juga sangat lemah hal ini disebabkan adanya misinterpretasi terhadap kewenangan yang dianggapnya tumpang tindih dengan penilik sekolah/pengawas sekolah di bawah Dinas Dikpora.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite sekolah di Kabupaten Sleman, secara kuantitatif sudah menunjukkan kinerja yang baik namun dari hasil FGD terungkap bahwa masih ditemukan dari beberapa peran yang mestinya dilakukan belum sepenuhnya dijalankan secara optimal, terutama peran *supporting* dan *controlling*.
- b. Belum optimalnya peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di kabupaten Sleman terutama peran *supporting* dan *controlling* disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :
  - 1) Adanya inkonsistensi kebijakan, dimana kebijakan yang satu dengan yang lain saling berbenturan, seperti PP No 17 tahun 2010 menegaskan pentingnya peran Dewan pendidikan dan Komite sekolah untuk

menggalang dana dari masyarakat dalam peran *supporting*, di sisi lain Permendikbud No. 60 tahun 2011 justru mengeluarkan larangan adanya pungutan biaya pendidikan dari wali murid.

- 2) Kurangnya dukungan sumber daya termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan biaya.
- 3) Masih adanya mispersepsi dan misinformasi dimana belum adanya kesepahaman dalam memaknai peran dan fungsi dari Komite sekolah dan dewan pendidikan khususnya fungsi *controlling*, sehingga fungsi kontrol yang mestinya dilakukan oleh komite sekolah kurang maksimal dilakukan.
- 4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program komite di setiap sekolah, terutama masyarakat di daerah terpencil.

## 2. Saran

- a. Pemerintah perlu membuat regulasi yang tidak saling berbenturan sebagai landasan hukum bagi dewan pendidikan dan komite sekolah dalam melakukan penggalangan dana.
- b. Pemerintah daerah perlu mensinergikan pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan mengalokasikannya untuk sektor pendidikan formal di daerah.
- c. Untuk pemerataan anggaran, pemerintah perlu membuat mekanisme alokasi anggaran yang akan didistribusikan ke setiap sekolah, dengan memberikan prioritas pada sekolah-sekolah yang paling membutuhkan secara objektif.
- d. Perlu mendorong pemerintah pusat untuk membuat mekanisme yang jelas agar aspirasi dari dewan pendidikan di daerah (Kabupaten Sleman) dapat terserap dengan mudah.
- e. Perlu membentuk dewan pendidikan di tingkat pusat untuk memudahkan komunikasi dan penyampaian aspirasi langsung ke pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Heri, 2005, "Mungkinkah Dana Pendidikan Murah?", *Rountable Discussion* tentang Pendidikan Murah Untuk Rakyat: Mungkinkah?, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan UMY.
- Babbie, Earl R. 1979. *The Practice Of Social Research, Second Edition*, Wadsworth Publishing Company, Inc, Belmont, California.
- Black, James. A dan Dean J. Champion. 1999. *Method And Issues In Social Research*, (alih bahasa E. Koswara, Dira Salam dan Alfin Ruzhendi), Refika Aditama, Bandung.
- Dwiyanto, Agus. dkk. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Bank Dunia, PEG-USAID.
- Denhardt, Janet V. & Robert B. Denhardt. 2003. *The New Public Service*, M.E. Sharpe, Inc., New York.
- Gaffar, Afan. 1998. *Public Policy: State of the Dicipline, Models, and Process*, Modul Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pasca Sarjana UGM, Tidak diterbitkan.
- Idea. 2005. "Pilih Nyekolahke Anak Apa Puasa Setahun?" (Beberapa Masalah Pendidikan Bagi Kelompok Miskin), *Warta Korupsi*, Edisi Khusus Pendidikan, IDEA, Yogyakarta.
- Nagel, Stuart S (ed.). 1994. *Encyclopedia of Policy Studies. Second Edition, Revised and Expanded*. Marcel Dekker, Inc. New York.
- Nurwanto. 2005. "Lonjakan Harga Sekolah: Aliansi Hitam versus Kebijakan Populis", disampaikan dalam *Rountable Discussion* tentang Pendidikan Murah Untuk Rakyat: Mungkinkah?, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan UMY.
- Oentoro, Joehannes. 2004. "Sistem Pendidikan Nasional 2003 Potensi dan Implementasi (Kajian Kritis terhadap Beberapa Pasal)", *Jurnal Kritis Studi Pembangunan Interdisiplin*, Vol XVI, No 2 Agustus.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Prasetyo, Eko. 2004. *Orang Miskin Dilarang Sekolah*, Insist Press, Cetakan ke-3, Yogyakarta.
- Ritonga, Jhon Tafbu. 2005. Waspada Online, "Subsidi Pendidikan dan Anak Balita", [http://www.waspada.co.id/bisnis/tinjauan\\_ekonomi/artikel.php?article\\_id=59409](http://www.waspada.co.id/bisnis/tinjauan_ekonomi/artikel.php?article_id=59409) *Bisnis - Tinjauan Ekonomi*, 19 Maret.
- Rofikoh, Nurul. 2005. *Kompleksitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Yogyakarta*, *Jurnal Populika Fisipol UWMY* Vol 1 No 2 Mei 2005.

- Rofikoh, Nurul. 2006. *Mewujudkan Good Local Governance Melalui Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik*, Jurnal Akreditasi Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta Volume 10, Nomor 1.
- Rosidi, Aji. 2004. "Pendidikan dan Kebudayaan", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/05/pddkn/1164164.htm>, 5 Agustus.
- RP Borrang. 2005. "Pendidikan Nondiskriminatif" Suara pembaharuan Daily, <http://www.smeru.or.id/beritadaerah/files/20040803didiknodiskrimpbhruan.htm>
- Siregar, Barita E. "Mempertimbangan Pendidikan", <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0904/08/0801.htm>
- Soewartoyo, 2002, *Desentralisasi Pendidikan dalam Perspektif Daerah Studi Kasus di Kota Mataram*, Jakarta.
- Supriyoko Ki. 2005. "Pendidikan Murah Untuk Rakyat Indonesia: Sebuah Analisis Kritis", disampaikan dalam *Rountable Discussion* tentang Pendidikan Murah Untuk Rakyat: Mungkinkah?, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan UMY
- Topatimasang, Roem. 2004. *Sekolah itu Candu*, Pustaka Pelajar dan INSIST, Yogyakarta
- Triaswati, Ninasapti. 2003. "Perkembangan Penduduk Indonesia di Masa yang Akan Datang dan Implikasinya Terhadap Permintaan Pelayanan dan Mutu Pendidikan", disampaikan dalam Pertemuan Nasional Memperingati Hari Kependudukan Dunia 11 Juli.